

# EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA CIKAMPEK TIMUR, KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

Siti Mastufah<sup>1</sup>, Lina Marliani<sup>2</sup>, Eet Saeful Hidayat<sup>3</sup>.

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : mastufahsiti081@gmail.com

## ABSTRAK

*Berdasarkan peninjauan awal diketahui bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang belum efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Program Bantuan Pangan Non Tunai belum dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ukuran efektivitas hal ini dikarenakan dalam pendistribusian BPNT masih terdapat beberapa permasalahan seperti lemahnya verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap calon penerima manfaat sehingga penentuan penerima manfaat kurang sesuai dengan keadaan di masyarakat. Ketidaksesuaian waktu dalam menyalurkan komoditi kepada masyarakat penerima BPNT sehingga tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Kurangnya kesesuaian komoditi yang disediakan dengan kebutuhan masyarakat karena komoditi telah ditentukan sebelumnya sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam menentukan komoditi yang dibutuhkannya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan agen kepada masyarakat penerima program BPNT mengenai jadwal pendistribusian BPNT serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia perangkat desa dalam menentukan sasaran penerima program BLT sehingga dalam penentuan penerima program kurang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan pemberian BLT. Oleh karena itu maka dilakukan berbagai upaya seperti melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk mengetahui kesesuaian penerima manfaat dengan ketentuan yang ditetapkan selain itu berupaya agar bantuan dapat diberikan secara rutin sesuai jadwal yaitu setiap bulan sekali sehingga masyarakat sasaran dapat memperoleh komoditi sesuai dengan kebutuhannya.*

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Program, Bantuan Pangan Non Tunai.*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan dan Kerentanan Pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus. Salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius dan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada.

Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pembuatan program-program penanggulangan kemiskinan diantaranya: menaikkan anggaran yang berkaitan (langsung/tidak langsung) melalui pendekatan pemberdayaan

berbasis komunitas, mendorong APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk program yang terkait, tetap mempertahankan program lama dan melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas harga. Serta melalui instrumen utama yaitu program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri, Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) pengembangan bahan bakar nabati, keluarga harapan serta permodalan melalui kredit mikro

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Dalam Pedoman Umum BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus. Sebenarnya, pemerintah berusaha membenahi dan

menyusun berbagai macam kebijaksanaan pendidikan yang diharapkan dapat memacu pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan rakyat dalam sektor ketahanan pangan yang dinamakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya yang digunakan hanya untuk membeli beras dan telur di pedagang bahan pangan atau disebut e-warung yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Program Bantuan Pangan Non Tunai diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program Bantuan Pangan Non Tunai mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan

waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga.

Program BPNT ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-Warung, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Elektronik warung gotong royong yang diselanjutnya disebut E-Warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

Setelah kurang lebih tiga tahun berjalannya program BPNT, kenyataannya program ini masih kurang optimal dengan perencanaan awal seperti kurangnya kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga menyebabkan beberapa masyarakat miskin belum menerima program tersebut dan menimbulkan reaksi kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena beberapa warga yang semestinya masuk ke dalam komponen penerima manfaat namun tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan non tunai. Permasalahan ini menjadi alasan mengapa bantuan pangan non tunai masih belum tepat sasaran. Ketidaktepatan waktu penyaluran BPNT juga masih sering menjadi masalah yang membuat Keluarga Penerima Manfaat belum dapat menerima manfaat dari program tersebut.

Berhasil atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk

mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai. Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas.

Makmur, (2011:7), menjelaskan bahwa : “Efektivitas suatu program dapat dilihat dari indikator-indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan-ketepatan sasaran”. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas diperlukan karena efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program.

Di Desa Cikampek Timur pada tahun 2019-2021 tercatat jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan dari program BPNT. Adapun untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Sasaran dan Penerima**  
**Program BPNT Desa Cikampek**  
**Timur Tahun 2019-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	553	365	66,00
2020	552	381	69,02
2021	550	438	79,64

Sumber : Desa Cikampek Timur, 2021.

Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah penerima program BPNT dari tahun 2019-2021

mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya perluasan penerima BPNT setiap tahun sebagai langkah pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Namun demikian apabila dibandingkan dengan sasaran penerima program BPNT belum semua sasaran dapat menerima program BPNT seperti pada tahun 2019 dari jumlah sasaran sebanyak 553 orang hanya dapat direalisasikan sebanyak 365 orang atau 66,00% sementara pada tahun 2020 dari sasaran sebanyak 552 orang hanya dapat direalisasikan sebanyak 381 orang atau 69,02% dan pada tahun 2021 dari sasaran sebanyak 550 orang hanya dapat direalisasikan sebanyak 438 orang atau 79,64%. Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya dilakukan verifikasi langsung ke setiap rumah calon penerima BLT.

Begitupula berdasarkan hasil observasi penulis, terlihat bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang belum efektif, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Lemahnya verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap calon penerima manfaat sehingga penentuan penerima manfaat kurang sesuai dengan keadaan di masyarakat. Contohnya : masih adanya penentuan masyarakat yang menerima BPNT tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga menyebabkan

masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan BPNT.

2. Ketidaksesuaian waktu dalam menyalurkan komoditi kepada masyarakat penerima BPNT. Contohnya adanya pemasok komoditi yang terlambat menyalurkannya ke agen sehingga proses penyaluran kepada kelompok penerima manfaat menjadi terlambat.
3. Kurangnya kesesuaian komoditi yang disediakan. Contohnya : pendistribusian komoditi kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena komoditi telah ditentukan sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok penerima manfaat.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan agen kepada masyarakat penerima program BPNT. Contohnya : komoditi belum diambil oleh masyarakat karena tidak mengetahui jadwal pengambilan karena tidak adanya informasi kepada masyarakat sebagai penerima program BPNT.
5. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia perangkat desa dalam menentukan sasaran penerima program BLT sehingga dalam penentuan penerima program kurang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan pemberian BLT.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam judul : **"Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang"**.

### **KAJIAN TEORITIS**

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang yang belum optimal. Menurut Siagian (2001:24) mendefinisikan sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sasar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terstruktur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan

tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan.

Makmur (2011:7)

mengemukakan bahwa ada delapan faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam efektivitas. Delapan variabel atau faktor itu meliputi, sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu  
Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Ketepatan perhitungan biaya  
Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan.
3. Ketepatan dalam pengukuran  
Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan

- suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan;
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan  
Kesalahan dalam memilih sesuatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya;
  5. Ketepatan berpikir  
Kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat bergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif;
  6. Ketepatan dalam melakukan Perintah  
Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.
  7. Ketepatan dalam menentukan tujuan  
Organisasi apapun bentuknya akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi;
  8. Ketepatan sasaran  
Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi;  
Dengan demikian efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya.
- Bantuan Pangan Non Tunai disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk

non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut e-warung yang berkerjasama dengan bank penyalur.

Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur di e-warung. Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan.

Begitupula dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai maka untuk mencapai efektivitas program maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan delapan faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam Efektivitas.

## **METODE**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa sebanyak 1 orang, Kaur Kesejahteraan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) sebanyak 1 orang, Pendamping desa sebanyak 1 orang, Pemilik e-warung sebanyak 1 orang dan Kelompok penerima manfaat (KPM) sebanyak 5 orang Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik sampling. Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian pada tiap-tiap dimensi sebagai berikut:

### **1. Dimensi Ketepatan Penentuan Waktu**

Ketepatan penentuan waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Waktu akan sangat berakibat terhadap suatu kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan. Penggunaan waktu secara tepat, maka akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya penulis sajikan sesuai dengan tiap-tiap indikator sebagai berikut :



Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi ketepatan penentuan waktu dalam pendistribusian BPNT belum efektif dari tiga indikator yang dijadikan alat ukur, hal ini dikarenakan tidak tepatnya jadwal pendistribusian BPNT kepada masyarakat selaku kelompok sasaran karena seringkali terjadi penyaluran BPNT disekaliguskan untuk beberapa bulan sehingga menyebabkan ketidaktepatan waktu dalam menyalurkan bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat serta masih kurangnya mempertimbangkan banyaknya KPM dalam suatu wilayah pada proses pendistribusian barang dari agen selaku penyalur.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan tujuan program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, serta PERMENSOS No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (PKH).

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pendistribusian BPNT kurang

memperhatikan ketepatan waktu sehingga tidak sesuai dengan jadwal karena dalam kenyataannya seringkali pemberian BPNT dilakukan sekaligus untuk beberapa bulan sehingga hal ini KPM merasa kesulitan dalam memanfaatkan bantuan karena memang untuk komoditi seperti daging KPM sulit untuk menyimpannya dalam jangka waktu lama karena tidak memiliki kulkas begitupula dengan barang lain karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin habis maka KPM seringkali menjualnya karena mereka membutuhkan barang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat ahli dan hasil observasi dapat diketahui bahwa dimensi ketepatan penentuan waktu dalam pendistribusian BPNT belum efektif hal ini dikarenakan dalam pendistribusian BPNT kepada kelompok sasaran tidak sesuai dengan jadwal sehingga tidak tepat waktu hal ini dikarenakan dalam pendistribusian BPNT kurang mempertimbangkan banyaknya kelompok sasaran pada suatu wilayah yang menyebabkan keterlambatan kelompok sasaran dalam memperoleh barang yang dibutuhkannya.

## **2. Dimensi Ketepatan Perhitungan Biaya**

Ketepatan perhitungan biaya merupakan suatu kegiatan baik dalam individu maupun organisasi bahwa ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Ketepatan dalam menetapkan suatu

biaya merupakan bagian dari efektivitas dalam pencapaian suatu tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang dimensi ketepatan perhitungan biaya dalam pendistribusian BPNT belum efektif dilihat dari ketiga indikator yang dijadikan alat ukur dalam melakukan penelitian hal ini dikarenakan kurangnya memperhitungkan kebutuhan kelompok sasaran mengingat dalam pendistribusian barang selama ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran mengingat semua barang ditentukan oleh agen sebagai penyalur barang selain itu dalam pendistribusian barang tidak didasarkan pada pemesanan dari masing-masing kelompok sasaran. Permasalahan lainnya kelompok sasaran tidak mengetahui harga dari masing-masing barang karena memang tidak diberikan nota pembelian barang sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah harga yang ditetapkan sama atau tidak dengan harga di warung biasa.

Sedangkan menurut Tim Pengendali BPNT (2020:4) dinyatakan bahwa :

Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program BPNT ini dipilih berdasarkan tujuan peningkatan nilai gizi dan nutrisi KPM, maka untuk pemilihan komoditi bahan pangan ini dapat berubah dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan KPM. Apabila dana bantuan pada bulan tersebut masih tersisa dan tidak

habis dalam periode waktu satu bulan tersebut, maka nilai saldo dana bantuan tersebut akan secara langsung tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik yang terhimpun pada kartu KKS keluarga penerima manfaat yang terkait dan dapat digunakan pada bulan berikutnya.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan bahwa pendistribusian barang kurang memperhitungkan ketepatan biaya hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih adanya ketidaksesuaian barang yang didistribusikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran mengingat barang yang disediakan sama seperti beras, tahu dan tempe, daging, telur dan buah-buahan padahal kemungkinan masyarakat memiliki perbedaan selera.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat ahli dan hasil observasi dapat diketahui bahwa pendistribusian barang kurang memperhitungkan ketepatan biaya hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam peyaluran komoditi kepada masyarakat sasaran karena dalam ketentuan bahan pangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KPM sehingga dapat bermanfaat tidak selama ini yang semuanya ditetapkan oleh agen E-warung sehingga barang yang disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan KPM. Permasalahan ini terjadi karena dalam penunjukkan E-warung kurang dilakukan verifikasi oleh pihak perbankan sehingga e-

warung yang ada sebelumnya tidak ada dan buka pada saat ada penyaluran BPNT saja sehingga tidak memiliki stok barang dan hal ini yang menyebabkan barang setiap bulannya telah ditentukan oleh agen E-warung.

### **3. Dimensi Ketepatan dalam pengukuran**

Ketepatan dalam pengukuran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang diberikan kepada individu merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi pendistribusian BPNT kepada kelompok sasaran kurang efektif karena kurang mempertimbangkan ketepatan dalam pengukuran hal ini terbukti dengan kurangnya mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda dari masing-masing KPM serta masih kurangnya memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran secara rutin mengingat dalam penyalurannya kadang tidak jelas waktunya serta penanggungjawab dilapangan tidak dapat berbuat banyak ketika ada permasalahan.

Sedangkan menurut pendapat Risnanda dan Broto (2018:8) menyatakan bahwa :

Berhasil atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya

tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan dalam pendistribusian BPNT kepada kelompok sasaran kurang mempertimbangkan ketepatan dalam pengukuran hal ini terbukti dengan adanya masyarakat sasaran yang menjual barang yang diterimanya karena ketidakjelasan jadwal dalam pendistribusian barang mengingat dalam pendistribusian barang diberikan sekaligus sehingga KPM kesulitan untuk memanfaatkannya dan terpaksa dijual karena kalau disimpan pun kemungkinan barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Sementara itu pelaksana kegiatan dilapangan mulai dari pendamping desa maupun TKSK tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat ahli dan hasil observasi dapat diketahui bahwa ketepatan melakukan pengukuran dalam pendistribusian BPNT belum efektif karena dampak program BPNT yang diharapkan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat sesuai dengan persyaratan-persyaratan program belum dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu

perlu adanya berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian program BPNT sehingga dapat membantu masyarakat sasaran sesuai dengan tujuan program yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **4. Dimensi Ketepatan dalam menentukan pilihan**

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan melalui ketepatan menentukan pilihan, karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan sistem pendistribusian bantuan pangan non tunai kurang memfokuskan kepada kelompok sasaran yang disebabkan oleh kurangnya pemerintah desa melakukan pendataan secara rutin dan dimasukkan pada basis data desa yang terkoneksi dengan kementerian sosial dalam bentuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu maka pemerintah desa telah berupaya melakukan pendataan untuk mengetahui keadaan masyarakat yang sebenarnya dan memasukannya kedalam basis data terpadu kesejahteraan sosial sehingga dapat diajukan untuk memperoleh bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek ketepatan dalam menentukan pilihan belum efektif dilihat dari ketiga indikator yang dijadikan alat ukur mengingat kurangnya keterbukaan terhadap data

penerima program BPNT setiap bulannya mengingat setiap bulan jumlah penerima program tidak tetap serta tidak digunakannya data pembanding penerima BPNT dengan kelompok sasaran yang belum menerima serta dalam pendistribusian barang kurang difokuskan kepada kebutuhan kelompok sasaran.

Ada beberapa kriteria yang digunakan oleh pihak pemerintah dalam memberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan telah ditegaskan dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2019, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah sangat mendukung program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya ketepatan dalam menentukan pilihan dalam pelaksanaan program BPNT hal ini dikarenakan dalam implementasinya program kurang memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran karena dalam kenyataannya masih banyak masyarakat sasaran namun belum mendapatkan BPNT. Selain itu kementerian sosial dalam hal ini kurang jelas dalam menggunakan data miskin dari masing-masing desa sehingga masih adanya

data penerima program yang belum sesuai dengan keadaan di masyarakat. Seperti adanya perluasan BPNT namun yang menang merupakan masyarakat termasuk menengah padahal sebelumnya telah ada ajuan dari pemerintah desa tentang usulan calon penerima program BPNT.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat ahli dan hasil observasi dapat diketahui bahwa masih kurangnya ketepatan dalam menentukan pilihan dalam pelaksanaan program BPNT sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh yang dilakukan dari kemensos sampai dengan pemerintah desa mengingat dalam pelaksanaan program BPNT masih terdapat ketidaksesuaian data penerima program BPNT dengan persyaratan penerima BPNT. Dalam arti adanya masyarakat yang dinilai mampu namun menerima bantuan BPNT sedangkan masyarakat yang benar-benar layak namun tidak menerima bantuan BPNT.

##### **5. Dimensi Ketepatan berpikir**

Ketepatan berpikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuannya yang sudah ditentukan. Dalam kaitannya dengan program BPNT maka pelaksanaan program memiliki ketentuan yang telah ditetapkan sehingga pelaksana program perlu memperhatikan ketentuan atau mekanisme dalam pelaksanaan program. Selain itu perlunya mempertimbangkan jarak tempuh dari pemberian bantuan dengan masyarakat sasaran sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memenuhi kebutuhannya. Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah mengenai pemberian sanksi kepada pelaksana kegiatan sehingga dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dimensi ketepatan berpikir dalam pendistribusian BPNT kurang efektif dilihat dari tiga indikator yang dijadikan alat ukur hal ini dikarenakan dalam pendistribusian BPNT masih terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan serta kurang memberikan kemudahan kepada penerima manfaat dan ketidaktegasan sanksi kepada E-warung selaku agen penyalur bahan pangan.

Menurut pendapat Hikmawati (2019:109) menyatakan bahwa :

Untuk menangani dan menyelesaikan terkait 6T yang menjadi penyebab permasalahan penyaluran bantuan pangan, maka sangat diperlukan suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) yang diharapkan agar dapat memberikan akses partisipasi bagi masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan program kebijakan BPNT.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui kurangnya ketepatan dalam berpikir pada pelaksanaan pendistribusian BPNT sehingga dinilai kurang efektif karena dalam ketentuan bahwa masyarakat bebas memilih barang yang dibutuhkan asal sesuai dengan kriteria di E-warung namun dalam kenyataannya agen telah

menetapkan jenis bahan pangan yang akan didistribusikan selain itu kurangnya agen memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh barang namun demikian penyimpangan-penyimpangan tersebut belum diberikan sanksi yang tegas kepada agen selaku penyalur bahan pangan kepada masyarakat penerima manfaat BPNT.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat ahli dan hasil observasi dapat diketahui bahwa kurangnya ketepatan dalam berfikir pada pelaksanaan pendistribusian BPNT sehingga dinilai kurang efektif karena dalam ketentuan bahwa masyarakat bebas memilih barang yang dibutuhkan asal sesuai dengan kriteria di E-warung namun dalam kenyataannya agen telah menetapkan jenis bahan pangan yang akan didistribusikan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pendistribusian program BPNT maka diperlukan evaluasi sehingga diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat selaku sasaran dari program pendistribusian BPNT.

#### **6. Dimensi Ketepatan dalam melakukan perintah**

Ketepatan dalam melakukan perintah merupakan aktivitas suatu organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami, dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti maka

pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang dimensi ketepatan dalam menentukan perintah masih dinilai belum efektif sesuai dengan tiga indikator yang digunakan sebagai alat ukur mengingat dalam pengadministrasian bantuan program BPNT kurang dilakukan pelaporan secara rutin kepada Dinas Sosial Kabupaten sebagai penanggungjawab pelaksanaan program BPNT pada tingkat kabupaten selain itu pelaksana program kurang mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak tentang pelaksanaan program dan kurangnya dilakukan pengawasan terhadap penerima manfaat.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa selama ini kurangnya ketepatan dalam melakukan perintah dalam melaksanakan program BPNT mengingat kurangnya tanggungjawab pelaksana program BPNT dalam menyampaikan laporan administrasi pelaksanaan program BPNT kepada semua pihak yang terkait sehingga adanya ketidakjelasan dalam mempertanggungjawabkan pendistribusian BPNT kepada masyarakat sebagai sasaran dari program.

Menurut pendapat Arikunto (2005:187) yang menyatakan bahwa :

Kegiatan evaluasi sangat berguna dalam sebuah langkah

pengambilan keputusan untuk penentuan lanjutan pada program yang telah dijalankan. Wujud dari hasil evaluasi adalah rekomendasi dari seorang evaluator dalam langkah mengambil sebuah keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat ahli dan hasil observasi dapat diketahui bahwa kurangnya ketepatan dalam melakukan perintah dalam melaksanakan program BPNT sehingga perlu dilakukan kegiatan evaluasi dari program BPNT sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta perlu adanya ketegasan dari pemerintah terhadap pelaksana di lapangan yang kurang melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan karena apabila dibiarkan tentukan merugikan masyarakat sebagai pemanfaat dari program BPNT.

#### **7. Dimensi Ketepatan dalam menentukan tujuan**

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi atau individu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tentang dimensi ketepatan dalam menentukan tujuan belum tercapai secara efektif sesuai dengan tiga indikator yang dijadikan alat ukur, hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang berhak menerima

manfaat namun belum menerima karena ketidakjelasan data yang digunakan dalam menentukan penerima BPNT, dan belum optimalnya pengidentifikasian kebutuhan masyarakat sasaran sehingga pendistribusian BPNT kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat Lestari & Murti, (2015:109) menyatakan bahwa :

Efektivitas pelaksanaan program BPNT tidak bisa dilihat secara parsial hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja. hal tersebut dapat dilihat yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pelaksanaan program yang efektif dapat dilihat dari penerapan selama ini yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan terutama berkaitan dengan pelaksanaan program BPNT.

Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa kurang efektifnya aspek ketepatan dalam menentukan pilihan karena memang selama ini tujuan dari pemberian bantuan BPNT kepada masyarakat belum dapat dinikmati oleh semua masyarakat yang menjadi sasaran program karena kurangnya dilakukan pengidentifikasian kebutuhan masyarakat sehingga kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat ahli dan hasil observasi dapat diketahui bahwa kurang efektifnya aspek ketepatan dalam menentukan pilihan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai sehingga belum dapat memberikan manfaat kepada kelompok sasaran hal ini disebabkan oleh kurangnya kebebasan KPM dalam memilih barang yang dibutuhkannya karena barang telah ditentukan oleh agen E-warung sehingga barang yang disalurkan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya.

#### **8. Dimensi Ketepatan sasaran**

Ketepatan-ketepatan sasaran yang tepat dan baik dapat menentukan keberhasilan aktifitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Peran pemerintah menjadi sentral kekuatan dari pelaksanaan program bantuan pangan non tunai. Perhatian dan kerjasama yang dikehendaki dalam pelaksanaan program yaitu instrumen pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat pedesaan atau kelurahan secara vertikal struktural.

Berdasarkan hasil penelitian tentang dimensi ketepatan sasaran belum tercapai secara efektif sesuai dengan tiga indikator yang dijadikan alat ukur, Dengan demikian adanya hambatan-hambatan masyarakat dalam memperoleh kemudahan kelompok sasaran dalam mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai dari agen hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah agen e-warung sementara jumlah masyarakat selaku KPM penerima

program BPNT banyak sehingga hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya agar dapat memberikan kemudahan kepada kelompok sasaran dalam mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai dari agen hal ini dilakukan dengan melakukan pendistribusian langsung kepada setiap KPM serta mengajukan tambahan agen E-warung di setiap Dusun agar masyarakat sasaran dapat dengan mudah memperoleh barang yang dibutuhkannya.

Menurut Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (2020:76) menyatakan bahwa :

Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan namanya termasuk di dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam pemberian bantuan tunai diketahui bahwa dapat dilaksanakan dengan baik apabila memenuhi berbagai persyaratan dalam pemberian



bantuan seperti yang telah ditentukan sehingga program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara efektif mengingat dalam pendistribusian BPNT kurang dilakukan sesuai dengan dimensi ketepatan waktu mengingat dalam pendistribusian BPNT tidak sesuai jadwal sehingga tidak tepat waktu, begitupula halnya dengan dimensi ketepatan perhitungan biaya kurang efektif sehingga pendistribusian barang dinilai kurang sesuai dengan pesanan dari KPM karena barang telah ditentukan oleh agen e-Warung serta adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh E-warung dengan warung biasa sehingga KPM merasa penetapan harga dinilai terlalu tinggi. Pada dimensi ketepatan dalam menentukan pilihan dinilai belum efektif karena dalam kenyataannya masih adanya masyarakat yang berhak memperoleh bantuan namun tidak memperoleh bantuan hal ini terjadi karena kurangnya dilakukan verifikasi dalam penentuan penerima bantuan serta kurangnya basis data miskin yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Dimensi ketepatan berfikir dalam pendistribusian BPNT kurang efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dalam

melaksanakan program dengan ketentuan dan belum dapat memberikan kemudahan kepada KPM dalam memperoleh bantuan serta kurangnya memberikan sanksi kepada agen sebagai penyalur barang kepada KPM. Pada dimensi ketepatan dalam melakukan perintah diketahui bahwa belum dilakukan secara efektif karena agen belum melaporkan pengadministrasian penyaluran BPNT kepada Dinas Sosial sebagai bentuk petanggungjawaban pendistribusian barang kepada setiap KPM serta belum dilakukannya pengawasan terhadap pendistribusian BPNT secara rutin. Pada dimensi ketepatan dalam menentukan tujuan belum efektif hal ini dikarenakan pendistribusian BPNT kurang disesuaikan dengan data target penerima karena belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan KPM sehingga belum memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu pada dimensi ketepatan sasaran dalam pendistribusian BPNT belum efektif mengingat dalam penentuan penerima BPNT tidak sesuai dengan ketentuan sehingga masih ada masyarakat yang berhak memperoleh namun tidak memperoleh bantuan. Selain itu KPM tidak memperoleh bukti penyerahan barang dari agen E-warung serta kurangnya kemudahan KPM dalam memperoleh barang yang dibutuhkannya karena keberadaan E-warung hanya ada 1 (satu) di desa Cikampek Timur.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui

bahwa efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang belum efektif mengingat masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan padahal dari segi persyaratan masyarakat tersebut berhak menerima hal ini dikarenakan tidak adanya basis data yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai dasar dalam memberikan bantuan, selain itu kurangnya kesesuaian dalam pemberian BPNT karena masyarakat kurang diberikan kebebasan dalam menentukan kebutuhannya mengingat selama ini barang sudah ditentukan oleh agen E-Warung. Permasalahan lainnya adalah kurangnya KPM memperoleh kemudahan dalam memperoleh barang mengingat jumlah E-warung hanya ada 1 di Desa Cikampek Timur sementara ada 6 dusun yang harus dilayani sehingga menyebabkan masyarakat yang jauh dari agen E-warung kesulitan dalam memperoleh barang yang dibutuhkannya. Selain itu masih kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian BPNT sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan dalam program BPNT belum dapat diselesaikan secara cepat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara efektif sesuai

dengan ukuran efektivitas hal ini dikarenakan dalam pendistribusian BPNT masih terdapat beberapa permasalahan seperti lemahnya verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap calon penerima manfaat sehingga penentuan penerima manfaat kurang sesuai dengan keadaan di masyarakat. Ketidaksesuaian waktu dalam menyalurkan komoditi kepada masyarakat penerima BPNT sehingga tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Kurangnya kesesuaian komoditi yang disediakan dengan kebutuhan masyarakat karena komoditi telah ditentukan sebelumnya sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam menentukan komoditi yang dibutuhkannya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan agen kepada masyarakat penerima program BPNT mengenai jadwal pendistribusian BPNT serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia perangkat desa dalam menentukan sasaran penerima program BLT sehingga dalam penentuan penerima program kurang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan pemberian BLT. Oleh karena itu maka untuk mengefektifkan Program Bantuan Pangan Non Tunai maka dilakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk mengetahui kesesuaian penerima manfaat dengan ketentuan yang ditetapkan selain itu berupaya agar bantuan dapat diberikan secara rutin sesuai jadwal yaitu setiap bulan sekali sehingga masyarakat sasaran dapat

memperoleh komoditi sesuai dengan kebutuhannya. Meningkatkan sosialisasi kepada semua pihak tentang program BPNT sehingga dapat meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap pedoman pelaksanaan program BPNT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas, 2017. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017.
- Hikmawati, Rini. 2019. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Watuwungkuk Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)*. Universitas Panca Marga Probolinggo
- Lestari, R. P., & Murti, I. 2015. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)*. 195–201.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
- Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) .
- Permensos No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Eletronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (PHK).
- Perpres RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai,
- Risnanda dan Broto. 2018. *Menganggulangi Kemiskinan Desa*. UGM. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Tim Pengendali BPNT. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.